

Catatan Mengenai Perkembangan Akuntabilitas Publik Pada Era Demokrasi di Indonesia

Oleh : Riyadi Santoso

Abstract

Public accountability as accountability to peoples on democracy era in Indonesian very sure will become developing, usually become with civil society growth. Actually, we need look for with take care that its developed still felt so many problems, because democracy transition in this country. Political Parties must have participation to improvement democracy transition processes, in the fact still became part of that self problems. Political Parties still internal problems self as, to development images, but on another aspect as fact do not transparency and not accountable. Fact so many candidats, members of political party to doing corruption problems and law cases others from in center level to regional level. This is one of many inconsistency, as euphoria democracy in Indonesia, but we optimistic that the people and society continous to improve democracy transition process with the powers in the civil society organizations, thats public accountability can to become realy as practice in the future.

Keywords: Public Management, Politics, Democracy and Leadership

A. Pendahuluan

Sebagaimana sedang kita saksikan dan rasakan bahwa bangsa dan masyarakat Indonesia setidaknya selama satu dekade lebih sedang dalam proses transisi demokrasi. Suatu perjalanan yang cukup melelahkan dan menyakitkan kita. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membicarakan judul yang sangat menarik yakni mengenai perkembangan “Akuntabilitas Publik Pada Era Demokrasi”, khususnya dalam konteks yang terjadi di Negara kita. Kaitan antara akuntabilitas publik dengan demokrasi sangat mendasar, untuk dipelajari dan diteliti lebih dalam. Hal ini dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa adanya asumsi dan hipotesis bahwa semakin berkembang suatu kehidupan demokrasi, maka akan semakin berkembang semangat akuntabilitas publik. Ini akan menjadi bahasan yang menantang, mengingat kondisi kita masih dalam “masa transisi” demokrasi yang entah sampai kapan akan berlangsung.

Harus disadari bahwa bangsa kita saat ini berada di tengah-tengah Era Milenium Baru Abad 21, yang penuh gejolak dan perubahan serta tantangan baru yang sangat besar. Menurut, *Nainggolan (2012)*, sebagaimana disampaikan dalam kajiannya pada Majalah Parlientaria, edisi khusus 94 TH.XLII 2012 Ulang Tahun DPR RI ke 67 Tahun 2012, setidaknya ada 7 (tujuh)

realitas baru, baik kita sadari atau tidak telah hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia, yakni :

1. Kita berada dalam sistem dunia yang sangat dinamis, dengan masalah yang jauh lebih kompleks. Dunia yg terintegrasi, perubahan politik dan ekonomi kawasan, dan sebagainya.
2. Dunia ditandai adanya perebutan kontrol atas Sumber Daya Alam (SDA) yang semakin terbatas.
3. Berlangsungnya konflik peradaban, walaupun masih pada tingkat partial atau terbatas, yang dulu diingkari, kini semakin nyata terjadi.
4. Instabilitas kawasan akibat konflik antar Negara yang tidak terselesaikan.
5. Meluasnya ketidakpercayaan atas sistem ekonomi global yang dikontrol oleh kapitalisme.
6. Munculnya keraguan atas demokrasi sebagai solusi final atas semua masalah dunia setelah defisit demokrasi bermunculan di Negara demokrasi baru, termasuk Indonesia.
7. Ancaman kerawanan pangan dan keterbatasan SDA air meningkat tajam, sementara ledakan pertumbuhan penduduk di depan kita.

Ketujuh realitas baru di atas setidaknya menjadi dasar dan pijakan mengenai apa saja dan kemana kita harus segera berbenah di dalam masa transisi krusial yang amat menentukan ini. Kegagalan menata transisi, akan semakin menguakkan pintu Indonesia menuju Negara, yang dikawatirkan para analis, sebagai Negara gagal (*failed state*). Untuk menghindari bahaya yang mencegat di depan kita dan menyelamatkan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seluruh komponen bangsa mestilah menyadari dan segera berbenah dengan terobosan-terobosan yang nyata.

Untuk itu beberapa sub tema yang akan kita kupas dalam pembahasan ini adalah seperti apa: potret akuntabilitas di Indonesia, isu dan kondisi transparansi yang sedang terjadi, bagaimana transisi demokrasi dan era multipartai. Dan tentu saja eksisting atau kondisi masyarakat sipil, yang ada disekitar kita termasuk perkembangannya. Dengan pendalaman sub-sub tema tersebut diharapkan kita akan semakin mengerti proses dan arah perkembangan akuntabilitas publik pada era demokrasi yang sedang terbangun.

B. Potret Akuntabilitas Publik

Mari kembali kita perhatikan disini realitas dan potret akuntabilitas publik, yang tengah muncul di tengah-tengah kehidupan kita dan diharapkan akan terus berkembang. Akuntabilitas publik sudah sepatutnya dilihat dari implikasi demokrasi dan merupakan kebutuhan untuk mengukur berjalannya demokrasi di masyarakat dan Negara kita. Asumsi dan hipotesis yang dapat kita ajukan adalah, bahwa semakin tumbuh dan berkembang demokrasi, maka akan semakin tumbuh dan berkembang akuntabilitas publik. Semakin demokratis maka akan semakin

akuntabel. Artinya sejalan dengan perkembangan ataupun pertumbuhan demokrasi, yang sedang transisi ini, akuntabilitas juga seharusnya tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan demokrasi itu sendiri. Namun pertanyaannya, apakah sudah seperti itu terjadi korelasinya?. Inilah pertanyaan mendasar dan berat untuk dicarikan jawabannya.

Para pelaku dan pemangku kepentingan, baik yang berada di dalam lembaga-lembaga Negara dan pemerintah, maupun yang berada di luar yang masuk dalam unsur masyarakat sipil (LSM, ORMAS, Kelompok-Kelompok Kepentingan Masyarakat, ORPOL/PARPOL (kalau itu memang bagian dari masyarakat sipil), sudah seharusnya saling membutuhkan, saling memperkuat dan perlu bersinergis dalam menumbuhkembangkan akuntabilitas publik. Dimana akuntabilitas publik sebagai alat utama (*basic tools*) kontrol pelaksanaan dan berjalannya suatu kehidupan demokrasi. Untuk itu perlu kita pertanyakan dan teliti, bagaimanakah kondisi akuntabilitas publik yang tengah ada di masyarakat ini. Untuk meneliti dan mengevaluasi kondisi akuntabilitas publik, kiranya alat ukur yang gampang adalah “adanya transparansi” dari sisi penyelenggara, dan “adanya partisipasi” dari sisi masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Maukah dan bersediakah para pemangku kepentingan untuk melaksanakan atau mempraktekkan “transparansi”, fairness dalam pengelolaan (manajemen)nya?. Bagaimana dengan tingkat partisipasi, yang dipraktekkan di masyarakat, apakah sudah betul mengarah kepada partisipasi, ataukah masih kental dengan mobilisasi. Ini semua dapat dilihat dalam praktek-praktek kehidupan dan pengelolaan ormas, lsm, parpol dan organisasi masyarakat sipil lainnya.

Kondisi yang terjadi dewasa ini, nampaknya masih cenderung dapat dikatakan “*lip-service*” dan “*formalistis*” walaupun ada kemajuan sejalan dengan kontrol masyarakat yang menguat, termasuk kontrol media masa. Coba kita perhatikan setiap hari diberitakan media masa atas berbagai kasus “penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, serta penyimpangan serta kolusi, korupsi dan nepotisme”, dari pusat hingga daerah, dari yang sangat besar hingga yang kecil, termasuk kasus suap dan pungutan liar. Masih marak, bahkan dengan skala masif dan tidak malu-malu dipertontonkan kepada publik. Namun anehnya semakin banyak pula yang tidak dapat segera dituntaskan dan diberantas dengan penegakkan hukum. Hukum seakan lamban, tumpul dan dapat diatur oleh para pemegang kekuasaan dan yang beruang atau bermodal banyak. Padahal kunci menegakkan dan membangun demokrasi dan akuntabilitas, adalah penegakkan hukum (*law enforcement*). Hukum memang harus ditegakkan setegaktegaknya dan seadil-adilnya, namun sebelum hukum ada manajemen organisasi masyarakat sipil (ormas, orpol, ornop) dan juga manajemen birokrasi serta manajemen publik (*public management*) pada umumnya seharusnya berjalan efektif. Maksudnya, jalan semua diselesaikan pada wilayah penegakkan hukum, yang sifatnya sudah represif. Secara preventif,

pengecahan itu akan dan bisa terjadi dengan pelaksanaan manajemen publik yang efektif, di segala lini kehidupan masyarakat sipil tadi.

Sebagai contoh, kalau manajemen parpol berjalan baik dan efektif, tentu akan menertibkan dan menindak para anggota dan kadernya yang melakukan pelanggaran dan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan norma yang berlaku serta etika publik. Para kadernya tidak dibiarkan melakukan penyimpangan-penyimpangan norma hukum dan norma etik, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme, yang telah menjadi kesepakatan publik untuk diberantas. Demikian juga anggota ormas dan ornop atau LSM, perlu mendisiplinkan anggota dan aktivisnya jika terjadi pelanggaran. Apalagi, di jajaran birokrasi publik dan lembaga negara, para pemimpin dan top manajernya, perlu mengefektifkan manajemen (pengelolaan)nya secara akuntabel dan transparan. Jika terjadi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, mesti ada tindakan tegas dan dapat dipertanggungjawabkan untuk segera memberikan *punishment* kepada anggota di jajarannya.

Warning control system di tataran manajemen publik ini nampaknya masih lemah atau dapat dikatakan kurang berjalan efektif. Ini terjadi di berbagai institusi Negara dan pemerintah, termasuk institusi pelayanan publik. Namun bisa juga terjadi di institusi swasta, para pelaku bisnis, LSM, ormas dan orpol, serta lainnya. Kondisi ini amat sangat merisaukan, seolah bangsa kita tidak pandai belajar dan selalu mengulang kesalahannya sendiri. Kondisi ini membutuhkan perhatian dan penanganan serius, apabila kita ingin membenahi persoalan akuntabilitas publik. Karena apabila berlarut-larut terus, yang terjadi penggerogotan legitimasi, penurunan kredibilitas, dan pembusukan sendi-sendi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara dan berpemerintahan.

Dari uraian singkat diatas, masih menunjukkan adanya akuntabilitas publik, yang tidak berjalan semestinya. Akuntabilitas publik berjalan dengan penuh batu sandungan, terseok-seok, dan masih cenderung formalisme. Padahal kita membutuhkan praktek akuntabilitas publik yang lebih substansial, jujur dan apa adanya. Demikian pula dengan sistem transparansi yang dikembangkan untuk menompang akuntabilitas publik. Transparansi yang dipraktekkan, masih seperti fenomena yang digambarkan diatas, yaitu masih cenderung "basa basi", *lip-service* dan cenderung formalistik, bukan esensinya dan semangatnya yang justru semakin diperlukan. Sebagaimana telah kita tegaskan dalam pembahasan yang lain, bahwa "akuntabilitas publik" merupakan "*suffient condition*", sedangkan "transparansi" dan "partisipasi masyarakat" merupakan "*necessary condition*". Artinya akuntabilitas publik akan dapat diterapkan atau terlaksana dan diwujudkan, apabila aspek transparansi dan partisipasi masyarakat terlaksana dengan baik, dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan.

C. Isu Dan Kondisi Transparansi

Telah disinggung diatas, bahwa salah satu inti akuntabilitas adalah transparansi, sebagaimana telah kita sampaikan daalam uraian sebelumnya. Isu dan kondisi transparansi kembali kita angkat, untuk mencermati kehidupan demokrasi kita, yang tengah berada di era transisional yang menentukan ini. Tanpa transparansi, demokrasi kita merupakan kebohongan. Karena esensi demokrasi adalah dari rakyat (masyarakat), oleh rakyat (masyarakat) dan untuk rakyat (untuk masyarakat). Isu dan kondisi tranparansi kepada publik (masyarakat), patut kita gugat dan pertanyakan kembali. Sudahkah transparansi berjalan dengan baik?, dalam arti sudah sesuai dan sejalan dengan perkembangan kehidupan demokrasi kita. Untuk menjawab permasalahan ini kita perlu menemukan peta dan posisi demokrasi yang terjadi dewasa ini.

Mari cobalah kita, telusuri perjalanan demokrasi kita setelah lebih dari satu decade atau 14 tahun (1998 – 2012) kita alami dan laksanakan oleh seluruh kekuatan bangsa Indonesia. Disini jelas sekali, adanya tonggak baru kebebasan menyatakan pendapat, berorganisasi dan berpolitik. Selain itu, kehidupan media masa yang bebas (kebebasan pers), yang tidak diragukan lagi. Perkembangan keduanya itu, telah membawa perubahan besar dalam masyarakat dan bangsa kita. Coba kita perhatikan, selama paling tidak sepuluh tahun terakhir, apapun yang terjadi di negeri ini, dari kasus besar hingga kasus kecil, bahkan yang sangat pribadi (*privelese*) manusia/individu sifatnya, bisa diberitakan (dikabarkan). Coba kita perhatikan juga, sekarang ini orang berani menyatakan pendapat, baik perseorangan maupun kelompok (organisasi), untuk mengkritik dan menyatakan pendapat, apapun yang tidak disepakati, protes, dan demo dimana mana, dari pusat-pusat pemerintahan hingga pedesaan. dari kota-kota besar hingga kota-kota kecil di pelosok negeri kita. Kedua contoh ini, telah menunjukkan adanya desakan yang kuat untuk adanya mengembangkan keterbukaan (transparansi).

Perkembangan yang positif tentang tuntutan transparansi ini, tentu tidak lepas dengan tumbuh dan perkembangan “demokrasi”, yang telah mengelinding sejak tumbangnya kekuasaan otoritarian. Selain itu, yang turut andil besar mendesak (mendorong) perkembangan demokrasi dan demokratisasi dunia, khususnya di Indonesia, adalah perkembangan pemikiran ataupun revolusi informasi dan komunikasi (satu sisi) dan pada sisi yang lain, adalah revolusi HAM (Hak Azasi Manusia). Perkembangan ini sangat menarik, sehingga telah membukakan mata kita ke alam nyata demokrasi di Indonesia. Tuntutan transparansi, yang didesakkan dari masyarakat (publik), sudah sepantasnya harus diimbangi terjadinya (pembenahan) transparansi di berbagai sektor, baik individual maupun organisasi. Organisasi kecil hingga besar, instansi dan birokrasi serta lembaga-lembaga Negara, pemerintah dan swasta/bisnis.

Kondisi transparansi, dengan memperhatikan fakta-fakta dan kasus-kasus yang terjadi beberapa waktu ini sebagai fenomena sosial, nampaknya masih menunjukkan “proses”

transparansi telah berlangsung. Transparansi masih mencari bentuk dan formatnya. Transparansi, tentu membutuhkan “nilai komitmen, nilai konsistensi dan nilai fairness” antar pihak, baik masyarakat maupun organisasi. Akhirnya saya ingin mengatakan bahwa transparansi, pada saatnya terjadi dan akan terjadi, dan demokrasi menjadi pilar bagi tumbuh dan kembangnya transparansi.

D. Transisi Demokrasi Dan Era Multipartai

Dalam tahapan konsolidasi demokrasi di era multipartai ini, kita coba menggagas upaya upaya untuk mengkoreksi transisi demokrasi. Banyak ahli berbicara bahwa transisi demokrasi yang sedang kita alami ini berkepanjangan, bahkan dikatakan melelahkan, dan menghabiskan banyak energi bangsa. Sehingga tidak mudah bagi kita untuk mengkoreksinya, namun bukan mustahil untuk dilakukan. Kehidupan politik kita yang multipartai ini tengah mengalami “euphoria” berpartai, karena begitu mudah orang melahirkan ataupun mendirikan partai politik, sehingga jumlah partai mengalami *booming*, sejak reformasi tahun 1998.

Banyaknya Partai Politik, tentu saja telah berimplikasi pada rumitnya manajemen penyelenggaraan pemilu, sengketa-sengketa politik, hingga kehidupan politik di lembaga – lembaga perwakilan, baik di tingkat pusat (DPR) hingga di tingkat daerah (DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota). Disisi yang lain demokrasi kita juga disinyalimen, berbiaya sangat mahal dalam penggunaan biaya, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, serta sumbangan masyarakat, karena selain untuk penyelenggaraan pemilu legislative, juga untuk pembiayaan pemilu presiden, pemilu kepala daerah (pemilukada) gubernur, bupati dan walikota.

Perbaikan sistem pemilu secara komprehensif nampaknya berada di urutan prioritas teratas, sehingga bisa tercipta kontrol permanen konstituen atas para wakilnya di Parlemen (DPR). Salah satu solusi adalah, revisi atas *electoral dan parliamentary threshold* harus dilakukan dengan menerapkan bilangan prosentase yang tepat untuk menciptakan kompetisi sehat antar parpol dan antar para wakil rakyat. Pemilu juga harus dibuat sederhana, agar tidak berbiaya tinggi. Demokrasi harus dibangun lewat proses pencerahan dan pemberdayaan di tingkat akar rumput (*grass-roots*), melalui pendidikan politik yang permanen. Sekolah, LSM, Ormas, Orsos, dan terutama parpol sebagai pelaku organisasi politik (Orpol) haruslah berperan di depan. Sehingga orang tahu untuk apa memilih dalam pemilu, siapa yang harus dipilih, tanpa dikendalikan oleh propaganda dan pemberian uang, dan apa konsekuensi jika salah pilih calon dalam pemilu.

Solusi pokok yang mesti dikerjakan dan memiliki keterkaitan adalah upaya membangun sistem politik secara menyeluruh, mulai dari : sistem kepartaian, sistem perekrutan, cara kerja partai, dan membangun ideologi partai yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Untuk itu

peran intelektual, dinantikan kembali untuk membenahi sistem demokrasi yang mengarah kepada “dekadensi dan koruptif” ini. Perlu merubah haluan, bukan sebagai pemain dan penikmat demokrasi, namun sebagai pembangun demokrasi. Kuncinya, adalah pendidikan politik secara menyeluruh di semua lini masyarakat dan organisasi.

Demokrasi kita cenderung dibangun di atas sistem yang kapitalistik, sehingga melibatkan penggunaan modal (*capita*) yang besar, karena dikalkulasi dengan banyaknya keuntungan financial dan kedudukan (kekuasaan). Ini sangat menyesatkan, salah arah dan akan menghancurkan sistem politik menuju Negara gagal, ditambah lagi dalam sistem kita masih terbawa semi-feodalistis, demokrasi kapitalis yang menghasilkan hubungan emosional, bukan fungsional-rasional. Padahal yang kita perlukan dalam membangun demokrasi adalah hubungan yang fungsional, yang diikat dengan kontrak sosial yang tidak permanen, yang akan berakhir kapan saja, jika para wakilnya dalam kinerjanya tidak lagi merepresentasikan kepentingan rakyat (konstituennya).

Jika sebuah sistem politik demokrasi baru, yang tidak dikontrol uang (*capital*) dapat dibangun, barulah sebuah sistem politik demokrasi yang bersandar pada pengawasan dan akuntabilitas publik, ataupun hukum (aturan main) secara lebih luas, dapat diciptakan. Dengan demikian, secara otomatis, penegakkan hukum akan dapat dilakukan. Demokrasi yang benar adalah yang seiring dengan penegakkan hukum.

E. Kondisi Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil (*civil society*) dalam pembahasan sebelumnya telah kita ketahui, betapa strategisnya masyarakat sipil, sebagai pilar dan syarat berkembangnya akuntabilitas publik. Sejalan dengan perkembangan “demokrasi”, pemberdayaan masyarakat sipil menjadi kunci untuk menumbuh kembangkan akuntabilitas publik dan sekaligus demokrasi. Pemberdayaan masyarakat sipil menjadi tugas seluruh pemangku kepentingan, apabila masyarakat sipil kuat maka sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan menjadi menguat. Dan demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang berjalan dan dikontrol oleh masyarakat sipil yang kuat atau berdaya saat berhadapan dengan kekuatan Negara dan pemerintah.

Masyarakat (*society*) terdiri dari individu maupun kelompok, baik yang terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang berinteraksi secara social, politik, dan ekonomi dengan aturan formal maupun tidak formal. Di dalam masyarakat maka termasuk organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), paguyuban, kekeluargaan, grup-grup sosial, termasuk RT dan RW. Kelompok-kelompok ini menjadi kekuatan dan sendi bagi tumbuh dan berkembangnya masyarakat sipil. Kita bergembira dengan adanya penguatan jaringan-jaringan sosial atau sosial networking, yang

terbangun melalui media elektronik dan internet. ini kekuatan luar biasa yang turut membantu perkembangan masyarakat sipil.

Di Indonesia, kekuatan dan kondisi masyarakat sipil mengalami pasang surut, namun perkembangan pasca gerakan reformasi, tahun 1998, keinginan untuk mengembangkan dan mendorong kemandirian masyarakat sipil terus berjalan. Munculnya berbagai LSM yang mengkritisi jalannya politik dan pemerintahan, termasuk pelayanan masyarakat patut diapresiasi. Sebelum reformasi pun telah bermunculan NGO-NGO (*Non Governmental Organization*). Ada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang bergerak dibidang advokasi masyarakat, juga LBH-LBH yang dibentuk oleh berbagai Ormas dan LSM. Ada YLKI yang berupaya membela konsumen Indonesia. Walhi (Wahana Lingkungan Hidup), yang bergerak dibidang lingkungan hidup. Setelah reformasi muncul lebih banyak lagi LSM-LSM, baik di tingkat nasional maupun daerah (local). Seperti ICW (*Indonesian Corruption Watch*), MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia), *Police Watch*, *Parliament Watch*, dan sebagainya yang hingga kini terus berkembang. Organisasi masyarakat sipil makin berkembang dan variatif, termasuk kontrolnya dalam media massa cetak dan elektronik. Hal ini menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, dalam arti positif bagi mengontrol dan mengkritisi jalannya pemerintahan, bernegara dan berdemokrasi.

Untuk mempertajam uraian diatas, dalam transisi demokrasi yang kita kaitkan dengan kondisi masyarakat sipil saat ini, maka cukup relevan hasil penelitian dari salah seorang peneliti senior LIPI, Dr. Siti Zuhro yang telah menyandang professor riset, dalam orasi ilmiahnya telah menyampaikan pencermatan atas “relasi birokrasi, politik dan masyarakat”, dengan judul Birokrasi dan Politik di Indonesia (18/9/2012). Menurut pengamatannya, salah satu kendala dalam mewujudkan reformasi birokrasi adalah belum terbangunnya relasi birokrasi, politik dan masyarakat yang menghasilkan sinergi dan saling memperkuat. Yang terjadi dalam *eksisting*, kondisi sekarang adalah masih saling mensubordinasi. Sebagai contoh praktek pemerintahan daerah semestinya melibatkan rakyat sebagai pemegang hak dan kedaulatan, namun yang terjadi adalah semakin besar pengabaian birokrasi dan kekuatan politik terhadap masyarakatnya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil di daerah masih ditinggal oleh birokrasi, padahal misi, tugas dan tujuan birokrasi adalah melayani masyarakat itu sendiri. Ini dapat dikatakan suatu pengingkaran, apabila masyarakat tidak diajak, berpartisipasi dalam menjaga jalannya birokrasi pemerintahan.

Hasil pencermatan Zuhro tersebut, menunjukkan pula bahwa masyarakat sipil masih lemah dan satu-satunya jalan adalah penguatan atau pemberdayaan masyarakat sipil, agar dapat setara dan berdaya berhadapan dengan birokrasi yang seharusnya melayaninya itu. Maraknya korupsi dan penyalahgunaan wewenang serta pelayanan publik di daerah, lagi-lagi

membuktikan bahwa penguatan dan pemberdayaan masyarakat di daerah sangat mendesak untuk diupayakan. Untuk itu LSM dan Ornop serta kekuatan masyarakat sipil lainnya, jangan hanya nampak kritis di pusat-pusat kekuasaan Negara di Jakarta, namun perlu membangun basis-basis penguatan di setiap daerah, sejalan dengan era otonomi daerah, desentralisasi politik dan ekonomi ke berbagai daerah di Indonesia.

F. Manajemen Publik Dan Kepemimpinan

Fenomena terjadi banyaknya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan serta kekuasaan di sektor publik, baik itu terutama di birokrasi publik, institusi publik atau lembaga Negara, dan tentu di organisasi kemasyarakatan (ormas, lsm) dan organisasi politik (partai politik), masih menunjukkan lemahnya *manajerial skill* pada sektor publik, yang berarti kemampuan manajemen publik yang masih lemah. Manajer-manajer publik ini tentu sudah sepantasnya dituntut memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam pengelolaan organisasi publik. Hal ini tentu saja berbeda dengan organisasi bisnis atau organisasi privat yang berorientasi pada tujuan bisnis dan mencari keuntungan. Wawasan dan keahlian (*skill*) atas sektor publik sangat diperlukan, agar yang bersangkutan mampu mengelola organisasi besar yang bertugas melayani dan mengayomi publik. Di sinilah, wawasan dan skill di bidang sosial, budaya, kemasyarakatan, politik, ekonomi, dan kewilayahan serta lainnya sangat dibutuhkan.

Terkait dengan manajemen publik, adalah dukungan strategis kemampuan kepemimpinan (*leadership*) yang memadai dan progress mengikuti perkembangan zaman dan sosial kemasyarakatan. Kepemimpinan menjadi faktor strategis dan penopang utama untuk memastikan bahwa manajemen publik bisa berjalan efektif. Kreatifitas kepemimpinan tentu sangat diharapkan dengan inovasi dan tampilnya gaya kepemimpinan yang modern dan rasional. Bukan kepemimpinan gaya feodalisme yang mengandalkan formalisme dan kewibawaan yang semu, dan ditutup-tutupi dengan membangun pencitraan yang penuh kebohongan. bukan pula model dan gaya kepemimpinan yang otoriter dan membangun kewibawaan dengan menakut-nakuti dan mengancam masyarakat atau rakyat yang dipimpinnya.

Nampaknya dewasa ini masyarakat dan rakyat (publik) semakin cerdas dan mengharapkan tampilnya pemimpin-pemimpin publik yang mampu memberikan contoh nyata atau keteladanan, menunjukkan jiwa kesederhanaan, proaktif turun ke tengah-tengah masyarakat dan mampu menyelesaikan masalah (problem solving) yang sedang dihadapi oleh masyarakatnya. Sudah saatnya harus dihentikan gaya kepemimpinan model raja-raja yang menak dan lalim (menunjukkan kekayaan dan kemewahan), feodal, menunggu laporan ABS, serta berbasa-basi memberikan pengarahan tanpa mampu memberikan solusi. Kita juga sudah

muak dengan tindakan kepemimpinan yang cilik dan korup, menghambur-hamburkan uang dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Mari kita hentikan dan akhiri masa dan gaya kepemimpinan yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan (harapan) masyarakat sipil Indonesia yang sedang membangun dan mengembangkan demokrasi yang beradab ini. Dengan kepemimpinan beretika, rasional dan proaktif tadi, diharapkan percepatan demokrasi dan kemajuan Indonesia semakin nyata.

G. Diskursus Dan Rekomendasi

Setelah kita bahas secara panjang lebar diatas, mengenai kondisi akuntabilitas publik termasuk kondisi transparansi yang menjadi pilar penting akuntabilitas publik, kemudian kita lanjutkan dengan melihat kondisi kehidupan demokrasi yang multi partai dalam masa transisional (di era transisi demokrasi). Kita juga tidak ketinggalan mencermati kondisi masyarakat sipil kita yang terus bangkit dan berkembang. Untuk itu alangkah cemerlangnya kita diawal tulisan ini telah mencoba memperhatikan mengenai realitas yang sedang kita hadapi di era milenium baru dan era transisi demokrasi kita. Diantara ketujuh gejala yang ditemukan itu, salah satunya sampai kita melihat, apakah kita benar-benar mengalami apa yang disebut sebagai "deficit demokrasi". Apakah ini dampak dari euphoria demokrasi, yang sudah lebih dari 10 tahun setelah reformasi 1998. Jangan sampai deficit demokrasi yang mengejala, di era transisi demokrasi di Indonesia ini, memunculkan keraguan kita bahwa demokrasi ternyata bukan memberikan solusi bagi pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Mudah-mudahan ini bagian dari pembelajaran demokrasi di era transisional tadi, dan segera kita seharusnya semakin pintar menata demokrasi kita, seperti kata para ahli, bahwa konsolidasi demokrasi sangat dibutuhkan bagi bangsa Indonesia, agar tidak terjebak pada kesalahan yang berulang. Karena kita sangat memerlukan kehidupan demokrasi yang sehat, sportif dan beretika (bermoral). Bukan demokrasi yang sekedar semangat formalisme yang berbalut feodalisme, penuh intrik, saling menjatuhkan, menghalalkan segala cara, dan membohongi publik atau rakyat dengan pencitraan. Ini tidak sehat, justru menjadi semacam pembusukan demokrasi.

Diskursus dapat kita pertajam lagi dengan mempertanyakan, sistem politik demokrasi seperti apa yang sedang kita kembangkan?, bagaimanakah upaya kita membongkar, mengkoreksi dan mencari upaya-upaya pembenahan sistem demokrasi kita?. Bagaimana pula kita mesti mengembangkan masyarakat sipil (*civil society*), agar akuntabilitas publik dapat tumbuh dan berkembang sehingga pada posisinya berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang efektif. Untuk menjaga sistem politik demokrasi kita, dengan penduduk nomor keempat didunia dan multi etnik, suku dan agama ini, maka demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945 serta tetap menjaga NKRI, merupakan harga yang tidak bisa ditawar-

tawar lagi. Selanjutnya sistem demokrasi kita, tentu demokrasi yang menjaga keberagaman dan multipartai, egalitarian, dan mampu membangun etika demokrasi yang beradab dan berkeadilan.

Selanjutnya tibalah saatnya kita menyampaikan pokok-pokok hasil pembahasan yang cukup mendalam ini. Tentu saja ini sebagai refleksi dan kepedulian setelah mencermati kondisi-kondisi diatas, khususnya di masa transisi demokrasi dan memperhatikan kondisi perkembangan masyarakat sipil di Indonesia. Untuk itu setidaknya penulis terpanggil dengan menyampaikan suatu rekomendasi sebagai berikut :

1. Hubungan korelasi antara akuntabilitas publik dan demokrasi tidak dapat disepelekan. Untuk itu para pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang sedang mendorong perkembangan kehidupan demokrasi di Indonesia, seharusnya berkepentingan untuk mendorong perkembangan dan kemajuan akuntabilitas publik.
2. Transparansi dan partisipasi menjadi kunci untuk menumbuhkembangkan perkembangan akuntabilitas publik. Kedua unsur ini juga menjadi penentu berkembangnya demokrasi. Oleh sebab itu sangat dianjurkan agar transparansi dan partisipasi dipraktekkan bersama-sama demokrasi dan akuntabilitas publik. Keduanya akan menjadi penggerak positif berkembangnya demokrasi dan akuntabilitas publik, karena memang transparansi dan partisipasi merupakan “*necessary condition*” bagi akuntabilitas publik dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Penguatan masyarakat sipil (*civil society*) di Indonesia dengan upaya-upaya konkrit dan kreatif untuk program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sipil (*civil society empowerment*), diantaranya melalui pendidikan politik, pendidikan social dan budaya, kemandirian masyarakat, tentunya akan sangat membantu perkembangan masyarakat sipil menjadi masyarakat sipil yang cerdas dan kuat (baca: mandiri). Hal ini sangat dibutuhkan untuk menompang kehidupan demokrasi di Indonesia ke depan.
4. Penulis mencermati dan meyakini bahwa manajemen publik ternyata menjadi kunci penting bagi kemajuan semua institusi dan organisasi di negeri ini. Oleh Karena itu kita perlu menyampaikan bahwa manajemen publik yang dipraktekan secara konsisiten dan efektif, oleh para pemangku kepentingan, baik di lembaga Negara, lembaga birokrasi, lembaga politik dan partai politik serta organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial serta lembaga swadaya masyarakat akan menjadikan masyarakat dan Negara kita maju berkembang, menjadi Negara yang terkelola dengan baik dan akuntabel.
5. Dan satu lagi hal strategis yang tidak dapat diabaikan adalah faktor kepemimpinan (*Leadership*) bagi bangsa Indonesia. Kita memerlukan kepemimpinan yang dapat menjadi tauladan, memberikan keteladanan dalam mempraktekan akuntabilitas publik dengan baik

(akuntabel) dan kapabel (mampu). Pemimpin yang bersih dan tidak korup (*trust*, dipercaya), tentu lebih baik lagi dengan kesederhanaan dalam kesehariannya, dan proaktif memecahkan masalah-masalah (*problem solving*) dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita telah muak dengan tampilnya para pemimpin yang korup, feodal, munafik, dan tidak memberikan keteladanan, serta tampil dan hadir memecahkan masalah di lapangan ketika masyarakat dan bangsa ini membutuhkannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Agus Dwiyanto, dkk., *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2002.
2. Ali Rifan, Naufil Istikharani Kr, Khalili, dkk., *Indonesia Hari Esok*, Purwokerto : Obsesi Press, 2012 bersama dengan Buku Litera, Yogyakarta, 2012.
3. Ambar Teguh Sulistiyani, *Memahami Good Governance* : Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia, Yogyakarta : Penerbit Gava Media, 2004.
4. Eko Prasojo, *Reformasi Kedua*, Melanjutkan Estafet Reformasi, Jakarta : Penerbit Salemba Humanika, 2009.
5. F. Budi Hardiman, dkk., *Empat Esai Etika Politik*, Jakarta : www.srimulyani.net, 2011.
6. Joko Widodo, *Good Governance*, Telaah dari dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi, pada era desentralisasi dan otonomi daerah, Surabaya : Penerbit Insan Cendekia, 2001.
7. J. Winardi, *Manajemen Perubahan (Management of Change)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.
8. Luthfi J. Kuniawan dan Hesti Puspitosari, *Wajah Buram Pelayanan Publik*, Jakarta : YAPPIKA, Aliansi Masyarakat Untuk Demokrasi, 2007.
9. Miftah Thoha, *Birokrasi & Politik di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2010.
10. Sofian Efendi, *Reformasi Tata Pemerintahan* : Menyiapkan Aparatur Negara Untuk Mendukung Demokratisasi Politik dan Ekonomi Terbuka, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2012.
11. Team Work Lapera, *Politik Pemberdayaan* : Jalan Mewujudkan Otonomi Desa, Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama, 2000.
12. Parleментарia, Majalah DPR RI edisi khusus Nomor 94 TH.XLII 2012 Ulang Tahun DPR RI ke-67 tahun 2012.